

Investigation Report: FSLDK

Meifita Dian Handayani

LISENSI DOKUMEN

Copyright: Digital Journal Al-Manär. **Lisensi Publik.** Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan artikel ini bagi kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial, dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

A. Sebuah Prolog, Mengapa FSLDK ?

Tulisan ini mengangkat tema Penguatan Jaringan FSLDK Melalui Optimalisasi Peran MCP (Media Center Puskomnas) dan Implementasi *Open Resources*. Merupakan suatu bentuk investigasi sederhana yang dilakukan Al-Manär terhadap Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional (FSLDK) yang merupakan sebuah jaringan lembaga dakwah kampus tingkat nasional.

FSLDK diangkat dalam *Special Report* edisi ini sebagai wujud keprihatinan Al-Manär terhadap permasalahan LDK yang kompleks, padahal LDK mempunyai peran yang strategis dalam proses transformasi masyarakat. FSLDK sebagai media untuk mempertemukan, *share* informasi dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan LDK pun tidak terlepas dari masalah yang membuat fungsi-fungsi tersebut belum terselenggara secara optimal. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini Al-Manär berupaya melakukan suatu investigasi untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang ada sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

Proses investigasi dilakukan dalam kurun waktu dua bulan, April- Mei 2004 dengan metodologi sebagai berikut. **Pertama**, analisis dokumen. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi dokumen internal resmi FSLDK, dokumentasi personal dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan tema yang diangkat. **Kedua**, *in depth interview* (metode snowball sampling). Yaitu dengan membuat list orang-orang kunci di FSLDK untuk kemudian di wawancarai. Orang-orang kunci tersebut meliputi koordinator Puskomnas JN UKMI UNS, koordinator Puskomda, beberapa ketua LDK atau PJ Hubungan Antar Lembaga (Humas atau Ekstern LDK), serta mantan aktor atau aktivis FSLDK. **Ketiga**, kuesioner dan atau wawancara singkat. yaitu dengan membuat list pertanyaan untuk ditanyakan kepada beberapa *contact person* LDK yang bisa dihubungi. Al-Manär melakukannya dengan mengirimkan list pertanyaan tersebut melalui email kepada alamat-alamat email *contact person* LDK yang kami miliki, selain sebelumnya menghubungi via telpon/SMS. Al-Manär juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa orang responden yang bersedia melalui media chatting. **Terakhir**, metode yang Al-Manär gunakan adalah meminta tulisan kepada Puskomnas FSLDK, dan personal yang punya kapasitas tentang FSLDK.

Tulisan yang sempat diakui Puskomnas (Pusat Komunikasi Nasional) FSLDK sebagai investigasi pertama yang dilakukan media luar terhadap FSLDK ini penulis akui masih memiliki banyak kekurangan. Tidak menutup kemungkinan telah terjadi banyak perubahan terhadap FSLDK dalam kurun waktu setelah investigasi ini dilakukan sampai dengan tulisan ini diterbitkan.

Sebagai sebuah awalan, dari proses investigasi sampai penyusunan laporan dalam bentuk tulisan ini tidak sedikit kesulitan yang penulis hadapi. Keterbatasan dalam mengakses data, maupun menemui aktor-aktor kunci untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan, hingga keengganan untuk bekerjasama, baik untuk sekedar wawancara, berdiskusi maupun berbagi tulisan membuat baru sebatas ini tulisan bisa sampai pada pembaca. Tulisan ini mungkin memang belum mencapai syarat untuk dapat disebut 'ilmiah'. Tapi penulis tetap berusaha untuk sebaik mungkin menyampaikan dengan jujur apa yang penulis temukan dalam proses investigasi tersebut. Oleh karena itulah dalam *special report* ini penulis menampilkan juga transcript wawancara dan draft data yang penulis kritisi dalam tulisan ini, selain artikel-artikel pendukung, agar pembaca dapat sungguh-sungguh menemukan konteks, alur dan logika tulisan.

Bahwa senantiasa ada itikad baik, dan semoga penulis dapat konsisten dengan niat awal ketika membuat investigasi tentang FSLDK ini, tentang harapan dan kesungguhan yang tulus dalam rangka 'pembelajaran', saling terbuka dan saling mengingatkan, *mensupport* dan senantiasa melakukan perbaikan untuk kebaikan bersama.

Mahasiswa, Kampus dan Dakwah

Masyarakat kampus adalah suatu masyarakat intelektual yang berpotensi besar dalam mengusung ide-ide perubahan dan perbaikan. Dari kampuslah terlahir konsep-konsep ideal, gerakan-gerakan berani menentang ketidakadilan, reformasi hingga revolusi. Gerakan menuju perubahan yang progresif sebagai *counter* atas "keamburadulan" zaman.

Mahasiswa, merupakan aktor yang paling berperan dalam jalannya cita-cita perubahan tersebut. Ia, sebagai sedikit orang di republik ini yang berkesempatan menikmati "kemewahan" kursi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, di tengah kondisi langkanya pendidikan berkualitas dan murah, sekaligus juga membawa beban untuk menjawab berbagai problema atas carut marutnya kondisi masyarakat.

Lembaga dakwah kampus menjadi elemen mahasiswa yang khas dengan *mainstream* dan idealisme tersendiri. Fungsi-fungsi mengubah, tidak sekedar mengubah, menuntut perubahan, mengoposisi sistem yang dianggap tidak benar, tidak adil, tapi lebih dari itu lembaga dakwah kampus, juga mengajukan solusi-solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang universal. Kelebihan inilah yang menjadi suatu semangat, suatu kekuatan idealisme yang kemudian membedakan lembaga dakwah kampus dengan elemen-elemen mahasiswa yang lain.

Sesuai dengan namanya, lembaga dakwah kampus merupakan elemen dakwah yang bergerak dalam konteks kampus. Di mana bukan hanya masyarakat kampus saja yang kemudian menjadi aktor sekaligus sasaran dakwahnya, namun juga umat secara

keseluruhan. Dengan mengingat bahwa mahasiswa yang memiliki kesempatan istimewa untuk memperoleh akses ilmu yang lebih banyak dan lebih luas itu memiliki peran yang sangat strategis untuk mengadakan perbaikan-perbaikan kondisi umat. Untuk itu idealnya ia tidak saja harus belajar memahami konsep-konsep yang ia pegang, yaitu islam, ia juga harus memahami konteks sosial masyarakat, dinamika, dan sekian banyak persoalan dalam lingkup lokal maupun global. Untuk memahami bagaimana kemudian ia harus mengambil sikap, menentukan posisi, merancang strategi dan melaksanakan perubahan sesuai konsep-konsep ideal yang ia yakini.

Bagaimanapun, perubahan tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman yang melingkupinya. Globalisasi yang telah didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi melatarbelakangi transformasi dalam aras budaya, politik, ekonomi hingga level kesadaran manusia. Ia telah menjadi realitas tak terbantahkan yang membawa dunia ini terus berlari. *Runaway world*, meminjam istilah Giddens. Dan daripada itu umat Islam mau tidak mau telah berada dalam arus yang sama, yang sayangnya kemudian ia dibawa dalam kondisi yang terus menerus memburuk akibat dari sistem global, kapitalisme, neoliberalisme.

Apakah kemudian mahasiswa muslim, yang notabene memiliki semangat dan idealisme kuat untuk membawa perbaikan bagi dirinya dan umat salah satunya melalui media lembaga dakwah kampus yang ada, memiliki kepekaan untuk 'membaca' zaman dan mempertajam analisisnya secara jujur dan cerdas untuk mencapai solusi-solusi riil. Selain kemudian mau terus membangun kapasitas dirinya untuk sanggup mengimplementasikan solusi-solusi itu. Semua itu masih dipertanyakan.

Aktivis dakwah kampus yang memotori lembaga dakwah kampus ini bukanlah orang-orang yang pergi ke medan perang tapi lupa membawa pedang, bahkan tidak tahu kekuatan musuhnya, bahkan siapa sebenarnya yang menjadi musuhnya. Ia juga bukanlah orang yang bersemangat tapi tidak tahu bagaimana berstrategi. Bagaimanapun perlu semacam sinergisasi antara komitmen, keilmuan dan skill lapangan yang memadai untuk "berbuat" sesuatu.

Apabila menyimak sejarahnya, dari hasil wawancara Al-Manär dengan salah seorang pendiri FSLDK, Ismail Yusanto, LDK lahir dalam sebuah situasi politik yang panas, di mana pada waktu itu terjadi ketegangan antara umat Islam dengan Pemerintah. Setelah asas tunggal, lalu tragedi Tanjung Priok tahun 1984, kemudian diterapkannya NKK/BKK di kampus-kampus. LDK ini kemudian dapat menjadi suatu alternatif dari situasi tersebut, juga mampu menjadi *third party* diantara dikotomi yang sangat kental pada waktu itu. Di antara pertentangan organisasi ekstra kampus seperti GMNI, HMI, hadirnya Jamaah Shalahudin misalnya di UGM, menepis semua itu. Bisa menetralsir semua dan menjadi semacam *meeting point* dan *melting point* dari semua organisasi-organisasi mahasiswa Islam itu.

Lembaga dakwah kampus yang pada gilirannya berusaha mengorganisir dirinya ke dalam sebuah forum bernama FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) nasional ini, telah berupaya untuk terus menerus memperbaiki dirinya, menghimpun dan menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dalam skala nasional. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ADK/LDK dalam mengemban tugas "dakwah"nya diharapkan bisa terbantu melalui adanya forum ini.

Dari latar belakang tersebut Al-Manär pada edisi ini berupaya mengangkat FSLDK dalam rubrik *Special Report* ini. Dengan fokus permasalahan Media Center Puskomnas (MCP) dan *Open Resources*. Al-Manär menganggap dua fokus ini sangat penting karena pertama, MCP yang saat ini diamanahkan kepada Jamaah Shalahudin UGM memiliki fungsi strategis untuk mengelola isu dan mencari solusi pada level nasional. MCP yang belum dua tahun berjalan ini masih membutuhkan banyak masukan dan evaluasi kritis untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan out put yang optimal bagi kepentingan dakwah nasional. Kedua, mengenai *Open Resources*, Al-Manär sangat berharap dengan *open resources* maka perkembangan LDK-LDK di seluruh wilayah Indonesia dapat semakin progresif, dengan jalan saling berbagi *resources* yang dimiliki oleh masing-masing LDK. Kami percaya bahwa tiap LDK memiliki potensi yang dapat dibagikan kepada LDK lain untuk bersama-sama memajukan dirinya. *Open Resources* ini juga memungkinkan LDK-LDK untuk sama-sama belajar dari keberhasilan LDK lain, begitu pun sebaliknya.

B. FSLDK, Bagai Katak Dalam Tempurung

Lembaga dakwah kampus, seperti juga organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain, menghadapi banyak sekali permasalahan internal yang cukup klasik. Dari mulai kaderisasi, manajemen internal anggota, dana, sistem administrasi, eksistensi di hadapan publik kampus atau masyarakat secara umum, masalah sumberdaya, bagaimana memformat acara-acara atau menyusun agenda yang menarik, dan lain sebagainya. Ada yang kebanyakan kader lalu bingung menghadapinya, mewedahi dan memfasilitasi semua dengan baik, akhirnya karena kesulitan “menjaga” anggota yang sudah masuk, banyak anggota potensial yang lari, terserap ke tempat lain. Kemudian ada juga yang sejak awal susah sekali menarik anggota karena kalah berebut dengan organisasi lain, seperti antara LDK dengan pergerakan mahasiswa muslim ekstra misalnya. Lalu masalah-masalah administratif seperti mengatur kesekretariatan, dokumentasi, hingga mengatur keuangan. Ketika akan melakukan kegiatan pun masih banyak lembaga dakwah kampus yang kesulitan hendak mencari dana dari mana. Sementara untuk mengandalkan dana matrikulasi dari universitas tidak mungkin mencukupi.

Masalah-masalah tersebut seringkali berulang, karenanya kemudian menjadi masalah klasik, seperti penyakit kronis menahun yang susah untuk diobati. Dari satu generasi kepengurusan ke generasi berikutnya, selalu begitu, bahkan tidak jarang bertambah parah, ketika ruh atau idealisme yang sejak mula menghidupkan lembaga tersebut semakin hari semakin terdistorsi.

Masalah profesionalitas, bagaimana mengelola sebuah lembaga terutama lembaga dakwah yang khas dan memiliki visi misi dan sasaran yang sebenarnya sudah sangat terpetakan, ternyata tidak mudah. Bahkan ketika sudah menginjak tahun ke delapan belas, adanya sebuah jaringan dakwah kampus nasional, sebuah forum komunikasi lembaga dakwah kampus bernama FSLDK, masalah-masalah tersebut ternyata belum juga teratasi.

Sekarang yang kemudian dipertanyakan adalah, apa yang sebenarnya menjadi kendala didalam LDK maupun jaringannya FSLDK, sehingga menunda terselesaikannya masalah-masalah klasik seperti yang dicontohkan di atas. Apakah

kemudian mereka menyadari adanya kendala-kendala tersebut?, jika ya, sejauh mana usaha-usaha telah diupayakan, dan sudah sampai di mana hasil yang mereka peroleh.

Jika kemudian banyak LDK ternyata masih berjalan di tempat, atau setidaknya berjalan tapi dengan tertatih-tatih, demikian juga dengan jaringan FSLDK. Maka perlu juga dipertanyakan, adakah yang salah dengan sistemnya, yang telah menghambat proses tersebut. Karena bisa jadi ada dua hal yang keliru disini, sistem atau aktor, atau keduanya. Sistem mempengaruhi kinerja aktor, namun sistem itu sendiri juga dibangun oleh aktor, sehingga korelasi diantara sistem dan aktor bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Karenanya tidak dapat memisahkan analisis aktor tanpa menyentuh sistemnya, demikian juga sebaliknya.

Berikut akan diungkapkan dalam rubrik ini analisis dari investigasi Al-Manär terhadap FSLDK sehubungan dengan tema *Open Resources* dan Media Center Puskomnas (MCP). Dari dua fokus tersebut pembaca dapat melihat poin-poin permasalahan yang mengemuka dalam LDK/FSLDK, baik dari ungkapan-ungkapan melalui wawancara Al-Manär dengan beberapa narasumber maupun dari data-data yang Al-Manär berhasil dapatkan.

Permasalahan LDK

Fenomena di lapangan, dari hasil pengamatan dan analisis terhadap data-data yang diperoleh maka permasalahan mendasar yang dihadapi oleh ADK/LDK adalah keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi, ketimpangan perolehan informasi antara pusat dengan daerah, antara lembaga besar dengan lembaga-lembaga kecil, berbagai ketimpangan tersebut sudah menjadi permasalahan yang lazim, tidak hanya pada LDK, namun secara umum juga pada lembaga-lembaga yang lain.

Mengapa bisa terjadi ketimpangan tersebut, ada banyak sebab yang melatar belaknginya, misalnya, akibat dari sistem pemerintahan yang dulu sangat sentralistik. Kekuasaan, dalam hal ini akses terhadap informasi, perekonomian, pendidikan, pengobatan, bahkan politik selalu ada ketimpangan, ketidakadilan antara pusat dengan daerah, antara minoritas elit dengan *grassroot*, antara yang kaya dan yang memiliki kekuasaan dengan yang sebaliknya. Ketimpangan-ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor geografis namun memang ada distribusi yang kemudian itu tidak adil.

Keterbatasan informasi yang dimiliki ADK/LDK juga bisa disebabkan karena kultur yang memang tidak terbuka. Yaitu keengganan untuk membuka dialog atau komunikasi dengan pihak lain. Berkomunikasi di sini bisa saja untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tukar informasi dan pengalaman, atau berbagi tentang apa saja yang bermanfaat dengan pihak lain. Ketika tidak ada keterbukaan maka hal itu tidak hanya akan mengakibatkan seseorang atau suatu lembaga menjadi teralienasi terhadap sekitarnya, teralienasi dalam pemikiran, wacana, bahkan mungkin secara fisik, semua itu akan menjauhkan mereka dari dinamika yang ada.

Seperti yang diungkapkan oleh Miftahul Huda, Ketua JS periode 1425H, ketika

ditanyai pendapatnya tentang pentingnya keterbukaan. Huda menjelaskan “ *kalo FS itu kemudian menutup diri, mereka akan tetap ada, tapi keberadaan mereka ya cuma ada saja. belajar dari sejarah, bangsa itu kalo menutup diri, itu dia ada dan dia mati. Ada tapi mati. Itu yang akan terjadi. Karena memang mereka kemudian tidak tahu, mereka harus meningkat seperti apa, mereka tidak tahu, mereka harus melakukan apa untuk meningkatkan kapasitasnya, mereka tidak tahu, mereka harus melakukan apa untuk memperbaiki hidupnya. Tidak tahu. Akhirnya, tidak pernah ada bangsa yang menutup diri itu menjadi besar. Ya sama, kalo peradaban FS ini membesar sudah saatnya harus menampung banyak informasi dan ilmu. Saya ga ngerti, karena untuk menerima ilmu dan informasi pun ternyata butuh kedewasaan dalam bersikap dan berpikir*”.

Apakah kemudian memang ada kecenderungan bahwa masih ada ketidakterbukaan di dalam LDK maupun aktor-aktornya, misalnya dalam membuka dialog dengan pihak luar maupun dalam berbagi dokumentasi. Dari hasil liputan Al-Manär, kecenderungan tersebut ternyata masih terjadi. Terbukti misalnya dalam dialog Al-Manär dengan Puskomnas berkaitan dengan liputan ini, Puskomnas menyatakan bahwa resources-resources LDK cuma untuk LDK, yaitu ketika kami menanyakan ada atau tidak dokumentasi yang bisa kami akses. Bahkan evaluasi pun hanya antar-LDK, seperti yang disampaikan oleh Moh. Eko, koordinator Puskomnas JN UKMI UNS dalam wawancara kami dengan tim Puskomnas di UNS pada tanggal 11 Mei 2004.

Ketidakterbukaan itu juga tampak misalnya ketika Al-Manär menyebarkan kuesioner kepada LDK-LDK di seluruh Indonesia yang bisa kami hubungi. Sebelum Al-Manär mengirimkan list pertanyaan seputar tema liputan kami, Al-Manär sudah menghubungi contact person LDK-LDK tersebut melalui SMS, untuk menyampaikan maksud kami dan menanyakan alamat email yang bisa dihubungi untuk mengirimkan list pertanyaan tersebut. Menurut catatan Al-Manär ada 15 contact person LDK yang kami hubungi via SMS, yaitu LDK Universitas Krisna Dwipayana, Universitas Riau, Universitas Andalas, IPB, ITB, STT Telkom, Universitas Mataram, Universitas Samratulangi, UI, Undip, Unair, Unsoed, IAIN Ar Raniry Aceh, Universitas Gorontalo, dan Universitas Mulawarman. Dari kelima belas contact person LDK tersebut yang merespon SMS Al-Manär hanya 12, kemudian setelah Al-Manär kirimkan list pertanyaan tersebut dengan menyertakan penjelasan tentang maksud dan sedikit ilustrasi tentang Jurnal Al-Manär, ternyata hanya 3 contact person LDK yang membalas email Al-Manär, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beberapa contact person LDK yang kemudian kami tanya mengapa belum membalas di antaranya menjawab, hal tersebut masih akan disyurokan, juga ada yang secara tegas menyatakan bahwa LDKnya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena apabila ada edaran harus koordinasi dulu dengan Puskomnas. Dan ternyata pada akhirnya memang hanya tiga LDK tersebut tadi yang memberikan respon. Hal ini di luar penyebab-penyebab teknis seperti terbatasnya akses internet, sudah tidak aktifnya contact person tersebut di LDK yang bersangkutan, maupun alamat email mereka yang memang sudah tidak aktif.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi, ada permasalahan apa yang kemudian menyebabkan Puskomnas misalnya tidak bersedia berbagi dokumentasi dengan Al-Manär yang merupakan pihak di luar LDK. Apabila dokumen-dokumen tersebut memang hanya diperuntukkan bagi LDK apakah kemudian LDK-LDK tersebut bisa mengakses, mengakses yang dimaksud bukan hanya ketika mereka meminta atau

menanyakan. Puskomnas menjawab bahwa kalau mereka (LDK-LDK) meminta, bisa. Jadi bukan sebuah langkah proaktif FSLDK untuk membuat sebuah mekanisme di mana LDK dapat mengakses referensi-referensi yang mereka butuhkan. Misalnya saja referensi tentang *proceeding* kegiatan, kaderisasi dan informasi-informasi yang lain yang dapat dipergunakan untuk *mensupport* LDK-LDK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mereka.

Mengapa demikian, ketika kami menanyakan alasannya Puskomnas menjawab “*kita berpikir lebih ke langkah-langkah konkret kedepan ya, untuk analisis dokumen bukan ga dibutuhkan, ga terlalu penting atau perlu untuk LDK se-Indonesia. Jadi kita Puskomnas dari dokumen itu kita bisa mengambil kesimpulan dan BP untuk bagaimana ke depan*”. Lagipula, tambah Moh Eko, “*yah, mereka sudah dapat seharusnya di FSLDK Nasional*”.

Apabila mereka memang sudah mendapatkan dokumentasi-dokumentasi tersebut di FSLDK Nasional, apakah kemudian mereka sudah memanfaatkan dokumen tersebut secara optimal sebagai bahan referensi dalam menjalankan LDK-nya? karena buktinya masih banyak ADK yang kesulitan dengan operasional LDKnya. Pertanyaannya di sini, apakah memang data-data tersebut -yang katanya telah diberikan kepada mereka- adalah data-data yang memadai untuk dijadikan rujukan dalam operasional LDK, atau tidak. Karena dari pengakuan Puskomnas sendiri, dalam wawancara yang sama, Puskomnas mengatakan “*.jadi untuk masalah dokumentasi belum semua LDK merasa penting.*” ini adalah kelemahan yang diakui oleh Puskomnas, bahwa memang pendokumentasian data dengan tertib belum banyak dilakukan oleh LDK. Puskomnas sendiri masih kesulitan untuk mengumpulkan data dari daerah, dokumen masing-masing LDK itu, diakui Puskomnas belum bagus, jadi untuk dikumpulkan jadi satu itu masih agak sukar.

Dari apa yang diungkapkan diatas, dapat diketahui bahwa, pertama kesadaran akan pentingnya pendokumentasian yang bagus memang belum ada, juga kesadaran untuk mau belajar dari dokumen-dokumen tersebut, menganalisis dan memilahnya sebagai rujukan.

Jadi, ada dua realitas pelik disini, pertama mereka tidak terbuka terhadap dokumentasi *resource-resource* yang ada, kepada pihak di luar LDK, seperti yang tadi diungkapkan. Kedua, mereka memang belum memiliki data-data dan dokumentasi yang cukup baik. Masalahnya kemudian menjadi rumit ketika mereka pada kenyataannya belum memiliki dokumentasi yang baik, dalam artian dokumen-dokumen yang sudah ada tersebut memiliki banyak kelemahan. Tetapi dengan tidak terbukanya mereka kepada pihak lain untuk mengakses dan menganalisis atau mengevaluasi dokumen tersebut, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi stagnasi disini, ketika dokumentasi tentang profil, kegiatan dan *proceeding-proceeding* LDK yang kurang baik tersebut disimpan saja tanpa dikritisi. Bahkan oleh LDK-LDK sendiri.

Tidak hanya itu, ketika tidak ada mekanisme saling belajar dengan keterbukaan, baik untuk mengakui kelemahan diri sendiri maupun untuk berbagi dengan pihak lain, sementara kepengurusan FSLDK dan LDK-LDK hanya sesaat (padahal sering kali terjadi keterpotongan informasi antargenerasi kepengurusan), maka lengkaplah sudah, mengapa dalam usia yang kedelapanbelas tahun pun tidak ada kemajuan yang menurut Al-Manär signifikan dari LDK maupun FSLDK.

Keterpotongan informasi antargenerasi kepengurusan tersebut diakui oleh koordinator Puskomda wilayah DIY dan eks Kedu, Joko, dalam wawancara Al-Manär dengan beliau tanggal 23 Mei 2004. Al-Manär menanyakan pada Joko, jika membandingkan antara Puskomnas UNS sekarang dengan Puskomnas sebelumnya, ITS, ada progress apa terhadap jaringan atau LDK. Joko menjawab” *kalo terasanya seperti apa itu tidak cukup apa ya, karena kita pergantian pengurus itu sudah berbeda. Sehingga transfer dari yang dulu itu, di sini ada keterpotongan. Sehingga saya merasakan yang di UNS itu. ITSnya saya belum begitu paham, karena mungkin saat itu saya baru staf* “.

Keterpotongan informasi tersebut jelas berpengaruh pada kurangnya informasi yang dimiliki ADK/LDK. Ketika di dalam LDK transfer informasi, pengalaman dan dokumentasi yang baik belum optimal, maka setiap generasi kepengurusan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa membandingkan, apalagi mengkritisi apa yang kemudian diamanahkan kepadanya. Mereka tidak tahu apa yang berubah, apa yang salah, apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Akhirnya akan terus terjadi pengulangan-pengulangan kesalahan yang sama di dalam lembaga tersebut.

Selanjutnya, keterbatasan informasi selain disebabkan oleh hal-hal diatas, juga dapat disebabkan oleh minimnya sarana dan kapasitas untuk memanfaatkan sarana yang ada. Dalam hal ini penyebaran arus informasi yang masih konvensional banyak menghambat berkembangnya LDK-LDK tersebut, tidak hanya karena kendala geografis, karena pada dasarnya semua itu masih bisa diatasi jika mau berusaha.

Pola komunikasi yang dibangun oleh LDK-LDK dalam jaringan FSLDK saat ini sudah menggunakan media internet. Sebuah kemajuan yang cukup baik. Puskomnas FSLDK menggunakan milis untuk menginformasikan sesuatu kepada LDK-LDK yang ada. Bahkan mereka seperti yang disampaikan oleh Puskomnas dan Puskomda yang kami wawancarai, rutin melakukan *syuro*’ lewat *chatting*, yaitu antara Puskomnas, BP Puskomnas dan Puskomda-Puskomda. *Chatting* tersebut minimal dilakukan dua pekan sekali. Dikatakan juga oleh puskomnas bahwa yang jelas alur informasi mulai lancar itu mulai kepengurusan Puskomnas UNS.

Namun ternyata masih banyak ADK yang belum dapat menggunakan media itu. Hal ini diakui oleh Puskomnas. Selain itu menurut pengakuan seorang ADK dari Indonesia Timur, Nurul dari LDK Universitas Sam Ratulangi yang kami wawancarai melalui *Chatting*, Nurul mengatakan bahwa sedikit sekali ADK di luar jawa memanfaatkan internet. Karena internet di sana hanya ada beberapa dan cukup mahal. Karena itu Nurul mengharapkan untuk menggiatkan lagi fasilitas telepon. Menurutnya, *“dulu informasi kalo nggak bisa disampaikan via email, kami akan telepon dan langsung turun lapangan jadi komunikasi dan masalah yang ada kami ketahui, minimal silaturahmi jalan, tapi sekarang, terus terang ana sendiri bingung, kalo ada masalah, mau mecahin sama siapa”*.

Tidak hanya itu, Nurul juga mengatakan bahwa saat ini informasi hanya sebatas milis dan paling banyak hanya berisi pernyataan sikap/ *press release* yang menurutnya itu tidak efektif. Sementara Joko dari Puskomda UNY berharap intensitas komunikasi diperbaiki, sehingga agenda-agenda, even-even atau acara-acara di Puskomnas hampir bisa diketahui di Puskomda. Kurang lancarnya informasi dari Puskomnas juga diakui oleh Syariffah, ADK dari IAIN Ar Raniry Aceh dan LDK STT Telkom Bandung.

Standar kelancaran informasi mungkin saja berbeda-beda. Puskomnas mengakui bahwa komunikasi sekarang lancar, sementara beberapa yang lain mengatakan kurang lancar. Secara objektif bukan permasalahan standar itu yang kemudian dipersoalkan. Tetapi memang pada kenyataannya media internet belum menjadi media yang cukup bisa dioptimalkan manfaatnya, bukan hanya karena cukup banyak ADK secara kapasitas belum bisa menggunakan, tetapi memang sarana masih kurang dan biaya yang terlampau mahal. Tidak saja di daerah-daerah, bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta saja biaya pemakaian cukup mahal. Jauh dengan di Yogyakarta, Purwokerto atau Bandung. Di mana warung-warung internet bertebaran terutama di daerah-daerah sekitar kampus, dengan tarif yang cukup murah.

Lalu apakah dengan keterbatasan tadi, ketidaklancaran informasi harus dimaklumi begitu saja? Tentunya ada usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk menyiasati hal tersebut, agar komunikasi tetap berjalan baik dan transfer informasi dapat dilakukan dengan lancar antar LDK-LDK bahkan di daerah yang belum tersentuh internet. Kendala geografis mungkin bisa menjadi alasan ketidaklancaran arus informasi tersebut. Namun pada era di mana pemanfaatan teknologi sudah demikian pesatnya, hal itu sebenarnya bisa ditanggulangi. Mungkin dengan menggunakan media-media lain.

Al-Manar sudah sempat menanyakan pada Puskomnas, apakah ada ide-ide yang progresif terkait dengan IT itu dari teman-teman teknik, ITB, ITS mungkin. Menurut Puskomnas ada, terlalu ideal dan akhirnya ditunda entah sampai kapan. Karena selain biayanya sangat besar, rumit, dari segi SDM itu belum memungkinkan.

Permasalahan lain terkait dengan arus informasi yang belum lancar, dari hasil wawancara yang kami lakukan ternyata salah satunya karena FSLDK belum menjadi isu yang populer di kalangan LDK itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Joko, koordinator puskomda UNY tentang perlunya sosialisasi FSLDK di kalangan LDK *“yang pertama adalah mencoba sosialisasi dulu. Karena kalau FS sendiri tidak dikenal kan percuma kita mencoba mengadakan kegiatan apapun. Respon dari LDK sendiri kan juga gak ada. Ya kita coba mengenalkan pada LDK-LDK semuanya dulu. Sehingga memunculkan peran aktif mereka, dan selain itu karena kita memang cukup kesusahan pada saat koordinasi, sehingga mencoba membuat komitmen atau apa”*. Antusiasme LDK, menurut Joko selama ini di Yogja belum tampak. *“Periode kemarin hampir semua LDK itu belum mengetahui FSLDK itu apa”*.

Di sini kita melihat bahwa, keterbatasan informasi dan belum sampainya informasi dari Puskomnas ke LDK-LDK memang masih terjadi karena ternyata FSLDK belum tersosialisasikan diantara LDK-LDK itu sendiri. Bagaimana mungkin informasi, data-data dan dokumentasi bisa sampai sementara tentang FSLDK sendiri banyak yang belum tahu. Apalagi sampai dirasakan kemanfaatan dari program, agenda dan kerja-kerjanya.

C. Open Resources, Sebuah Solusi?

Ketidakterbukaan, seperti yang dijelaskan diatas ternyata menimbulkan banyak

masalah yang laten. Eksklusivitas, kekhawatiran yang berlebih, kurang mau membuka diri untuk berdialog, dst banyak menghambat kerja-kerja LDK/FSLDK. Sementara disisi lain masih ada ketimpangan kapasitas, keterbatasan informasi antara LDK-LDK yang ada. Untuk itulah di sini Al-Manär mengajukan konsep *Open Resources*.

Keterbukaan, bagaimanapun, bagi siapapun adalah suatu hal yang mutlak penting. Keterbukaan membawa manusia pada kearifan dan kejujuran dalam menengok kedalaman diri sendiri, mengakui kekurangan-kekurangannya dan terus tanpa malu belajar dari orang lain, siapapun. Sebaliknya, keterbukaan berarti juga mau dengan rendah hati berbagi apa yang dimiliki baik wacana, ide, gagasan untuk perbaikan dan kebaikan bersama.

Keterbukaan dalam LDK, memungkinkan untuk saling berbagi, saling memberi dan belajar dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak hanya antarLDK saja, tapi pihak manapun. Ketika ADK/LDK maupun FSLDK belum berani membuka diri maka yang akan terjadi adalah suatu kemandegan. Kemandegan dalam berpikir, bersikap dan berrelasi. Mereka juga akan teralienasi, eksklusif, tidak familiar di kalangan aktivis dakwah apalagi masyarakat umum yang menjadi sasaran dakwahnya. Frame berpikir menjadi sangat sempit ketika mereka tidak berusaha membuka diri dalam melihat cara-cara berpikir lain. Seperti yang dikatakan oleh Miftahul Huda, dia berpendapat *"...seseorang itu akan bisa memperbaiki kondisi masyarakatnya, sebenarnya kalo dia sudah keluar, sudah pernah melihat dunia lain. Sudah hijrah dari masyarakat itu. Hijrah ide, hijrah pemikiran, pengalaman..."*

Bagaimana dakwah, sebagai sebuah aktivitas mengubah dapat berjalan apabila lembaga dakwah yang secara jelas mendedikasikan diri kedalam kegiatan dakwah ini menutup diri dari perubahan itu sendiri. Artinya, ketika seseorang atau suatu lembaga dakwah itu tertutup maka dapat dipastikan dakwah akan *mandeg*. Karena pertama, ketertutupan itu akan membuat ia eksklusif, tidak bisa dikontrol oleh publik di dalam jaringan sendiri apalagi oleh pihak eksternal. Ia menjadi eksklusif untuk bisa dievaluasi, untuk bisa dikritisi. Sehingga ia tidak bisa menemukan kekurangan-kekurangan di dalam dirinya sendiri. Seandainya ia besar, ia hanya akan besar di dalam framenya sendiri, tidak di hadapan publik.

Dalam sebuah tulisan yang kami dapatkan dari Puskomnas, ditulis oleh Moh.Eko, di mana tulisan tersebut telah dimuat di Ad Dakwah edisi perdana yang diterbitkan oleh PKS, di sana ditulis *"...kami sangat mengharapkan masukan, kritik, saran maupun usulan yang akan dibawa pada acara yang dinantikan oleh para aktivis dakwah kampus.."* Namun pada kenyataannya tidak demikian. Ketika Puskomnas secara jelas juga menegaskan bahwa *"...evaluasi hanya antar LDK ya.."*

Masukan, kritik dan saran maupun usulan yang bagaimana yang mereka harapkan, jika publik sendiri tidak mengetahui tentang mereka, tidak bisa ikut mengakses dan menganalisis data yang mereka miliki. Logikanya seseorang dapat memberikan pengkritisan, evaluasi dan mengajukan masukan-masukan jika ia paham tentang sesuatu yang akan dikritisi itu. Jika tidak maka ia hanya "asbun" saja, asal bunyi. Sementara untuk paham dan melakukan analisis-analisis yang tajam ia juga membutuhkan data-data, referensi dan sumber-sumber lain yang relevan. Sekarang, bagaimana itu bisa dilakukan sementara data-data tersebut eksklusif, tidak bisa

diakses, dan orang-orang yang berada di dalamnya juga tidak terbuka, walau untuk sekedar menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Siapa yang akan dikritisi, apa yang harus dikritisi, dan siapa yang mau mengkritisi disini?.

Jika dikatakan bahwa evaluasi hanya antar-LDK, bahwa mekanismenya harus seperti itu, apakah ada jaminan bahwa di dalam FSLDK itu sendiri akan ada sebuah mekanisme *crosscheck* yang bagus, pengkritisan yang bagus sehingga akan ada perbaikan-perbaikan. Padahal, seperti diketahui bersama FSLDK hanyalah sebuah forum yang tidak mengikat, tidak ada hubungan struktural yang rigid dalam distribusi wewenang dan otoritas. Akan kami uraikan dalam Bab selanjutnya tentang Media Center Puskomnas, bahwa mekanisme kontrol dan evaluasi itu sendiri belum berjalan di dalam jaringan LDK tersebut.

Selain itu apakah mungkin ada proses evaluasi dan pengkritisan yang bagus didalam FSLDK jika berkomunikasi saja susah. Untuk “curhat” saja, Nurul dari Samratulangi itu kebingungan harus bicara dengan siapa, apalagi untuk melakukan evaluasi. Apabila kemudian mengandalkan forum bertemu secara nasional pada FSLDK Nas yang dilaksanakan dua tahun sekali, pertanyaannya apakah forum tersebut mencukupi. Apakah cukup kondusif untuk memberikan kesempatan setiap orang berbicara, menyampaikan pandangan-pandangannya, permasalahan-permasalahannya dan juga memberikan pengkritisan, evaluasi.

Karena seperti yang disampaikan oleh Huda, “...*kalau cerita orang-orang yang datang ke FS itu, susah untuk kemudian menyampaikan ide secara komplit dari A-Z, itu susah. Forum yang berkembang tidak memungkinkan. Jadi kalau ada orang usul lama itu sudah langsung diminta untuk berhenti. Kasarannya seperti itu. Banyak yang mau bicara*”.

Ketika Al-Manär menanyakan bagaimana FSLDK Nasional itu, Puskomnas menjelaskan, “... *untuk FSLDK Nas, ada tiga komisi, bukan pertanggungjawaban, jadi kita pandangan umum aja. Apa ya namanya, penyampaian pandangan umum Puskomnas gitu. Jadi menyampaikan selama ini perjalanan LDK seperti apa disampaikan ke forum. Jadi bukan forum kayak Musyawarah Anggota atau Musyawarah Besar, LPJ terus diterima ditolak, itu enggak. Karena kita forum, tidak ada ikatan struktural, maka pandangan umum aja dari Puskomnas, terus setelah itu ada pembagian komisi-komisi, yang itu merupakan kebijakan kegiatan nasional ya, jadi ini dua tahun ke depan kira-kira Puskomnas melaksanakan ini. Dan ini memang diamanahkan ke Puskomnas. Ada komisi A, komisi B, komisi C. A isu-isu nasional, B ke-LDK-an, C Jarmus, Misalnya isu-isu nasional apa yang disikapi, latarbelakangnya, sebagainya, itu disepakati secara bersama disana. Disamping itu juga ada acara-acara suplemen, untuk up grade juga, untuk LDK-LDK yang peserta*”.

Sejujurnya, Al-Manär tidak dapat melakukan penilaian terhadap jalannya forum tersebut karena Al-Manär tidak mendapatkan data tentang *proceeding* FSLDK Nasional. Masalah yang ditekankan di sini adalah bukan pada bagaimana forum berlangsung, tapi apakah ada proses evaluasi yang bagus, yang optimal di antara LDK dalam jaringan tersebut, baik itu melalui forum di mana mereka bertemu, FSLDK nasional, forum *chatting*, atau milis misalnya. Jika kemudian keterbatasan komunikasi, ketidaklancaran arus informasi itu sudah diakui maka hampir pasti belum ada mekanisme evaluasi yang baik di dalam jaringan FSLDK tersebut.

Kemudian yang dipertanyakan di sini, merujuk pada uraian diatas, dengan mempertimbangkan berbagai kendala, keterbatasan yang ada, apakah kemudian kultur yang tertutup, eksklusif tersebut akan tetap dipertahankan. Tentu saja semua itu kembali pada masing-masing individu di dalamnya.

Saatnya Berbagi Resources

Menyadari bahwa masih ada ketimpangan antara LDK satu dengan yang lain baik dalam hal sumber daya, maupun dalam hal yang lain di mana kemudian menurut Puskomnas ada klasifikasi LDK, yaitu LDK mapan, madya dan LDK pemula. Kebanyakan LDK, seperti juga yang diakui oleh Puskomnas masih sibuk dengan permasalahan internal, bagaimana mengurus kader, mengatur dan mencari dana untuk kegiatan-kegiatan, mengurus dokumentasi, hingga menggarap lahan dakwah, menyikapi permasalahan-permasalahan di kampusnya.

LDK-LDK yang ada memang tumbuh dalam konteks masing-masing. Mereka tidak tumbuh bersama-sama, tidak menghadapi masalah yang melulu sama. Ada nilai-nilai lokalitas yang khas disini, ada potensi-potensi yang juga tidak seragam, ada perbedaan-perbedaan yang memang fitrah. Yang dipersoalkan disini bukanlah bahwa perbedaan, potensi, kekhasan tersebut harus diseragamkan. Karena berbagi *resources* bukan seperti itu tujuannya. Bahkan kemudian tentang *resources* ini juga harus di bedakan. *Resources* yang Al-Manär maksud bukan data-data internal yang rahasia, dan memang tidak baik untuk disampaikan ke luar. Justru kemudian masing-masing harus menghormati adanya rahasia-rahasia internal tersebut. Berbagi *resources* yang Al-Manär tekankan disini adalah, berbagi sesuatu yang bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi pihak lain, berupa wacana, ide, gagasan maupun berupa data-data seputar kegiatan, *proceeding* kegiatan A, kegiatan B, kepanitiaan apa, kemudian program pengkaderan yang bagus, cara mencari dana yang bagus, cara membuat media penerbitan yang bagus, cara pendokumentasian, pendataan atau mengurus kesekretariatan yang bagus, cara mendapatkan buku-buku yang bagus dari lembaga-lembaga luar dengan gratis, dan masih banyak lagi. Karena mungkin sekali apa yang menjadi kekurangan di satu LDK menjadi suatu kelebihan di LDK yang lain. Begitupun sebaliknya.

Tapi ketika kemudian mereka tidak terbuka, tidak saling mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui, kelebihan dan kekurangan masing-masing, apalagi berbagi, maka tidak ada perbaikan satu sama lain. LDK, seperti disampaikan Ismail Yusanto pada Al-Manär ketika Al-Manär menyampaikan belum ada keterbukaan soal dokumen, beliau mengatakan bahwa “..*kalau menurut saya mestinya tidak begitu. Karena semangat kita dulu, semangat share, semangat berbagi, semangat memberi, semangat untuk bagaimana kita make influence, kepada kawan, kepada lembaga yang lain, untuk mereka juga bisa maju, gitu..*”

Mungkin saja usaha-usaha berbagi *resources* sudah dilakukan oleh LDK-LDK tersebut, misalnya melalui kunjungan-kunjungan antarLDK, studi banding dan sebagainya. Tapi tidak semua LDK dapat melakukan itu, dengan kendala jarak, biaya dan sebagainya. Itu hanya salah satu usaha proaktif dari LDK-LDK yang bersangkutan saja, bukan merupakan sebuah mekanisme yang sengaja dibuat secara menyeluruh dan dimanfaatkan atau bermanfaat secara menyeluruh pula. Tidak

terbatas pada LDK-LDK yang dekat, LDK-LDK yang dipandang mapan. Karena bisa jadi ada potensi-potensi lain yang dimiliki oleh LDK-LDK belum mapan, sehingga dalam hal ini yang belajar bukan hanya LDK belum mapan kepada LDK mapan, tapi juga sebaliknya.

Pertanyaannya kemudian apakah usaha-usaha berbagi resources ini mungkin untuk dilakukan dalam skala yang lebih luas?

Jika, seperti yang diceritakan di atas, ada kesulitan-kesulitan untuk berkoordinasi, mengumpulkan LDK-LDK dalam suatu forum karena antusiasme LDK dan popularitas FSLDK sendiri juga masih kurang, kemudian media internet yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, keterbatasan geografis, dana, waktu dan sumber daya, yang semua itu membuat komunikasi secara teknis belum berjalan dengan baik sehingga arus informasi tidak lancar, maka usaha-usaha *open resources*, berbagi *resources* antar LDK membutuhkan alternatif lain agar tetap bisa dilakukan.

Sayangnya, Al-Manär menangkap belum ada upaya-upaya ke sana yang akan dilakukan oleh Puskomnas FSLDK. Bahkan kesadaran berbagi resources secara menyeluruh kepada LDK-LDK di Indonesia itu belum ada. Misalnya, Puskomnas mengatakan, “..FSLDK dari dulu saya pikir ada usaha-usaha *open resources*. Tapi sekali lagi masih proses. Temen-temen Jayapura ga mungkin kita kasih resources yang begitu memusingkan dari temen-temen yang di Jawa. Temen-temen yang di Ambon itu mikirnya jihad gitu ga ada pikiran bagaimana mengarsip data, dokumentasi, itu ngga. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kebutuhan tiap LDK-LDK itu juga beda-beda. Artinya *open resources* itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Artinya informasi merata bukan berarti berhasil, itu ngga. Kan ga cukup dengan keping-keping CD saja. Dan itu insya Allah ada di FSLDK gitu ya, *open resources*. Artinya ketika ada yang butuh konsep pembinaan ya kita kasih, akan tetapi sekali lagi kita masih pengumpulan untuk informasi-informasi, gak semudah konsep yang kita bangun, gampang ini, kita kumpulkan ini terus diolah. Di lapangan, kita orang-orang lapangan yang sekarang juga masih bergelut untuk pengumpulan informasi. Kita insya Allah masih terus melakukan proses itu. Artinya *open resources* itu berproses, jadi ga sekedar konsep...”

Dari pernyataan di atas, Al-Manär melihat paradigma yang dibangun sangat elitis dan *topdown*. Kebutuhan setiap LDK memang berbeda-beda, kita mengakui itu. Tapi dengan kesulitan-kesulitan yang ada dalam pengumpulan informasi, akan sampai kapan Puskomnas menunggu agar dapat membaca kebutuhan LDK-LDK yang demikian banyaknya. Dan akan sampai kapan LDK-LDK menunggu kebutuhannya dibaca dan difasilitasi oleh Puskomnas. Sementara kita juga mengetahui, komunikasi yang dibangun belum optimal.

Satu lagi pernyataan Puskomnas yang menegaskan cara berpikir *topdown* tersebut adalah “...kita ga se-elitis itu. Masalahnya LDK-LDK kebanyakan itu masalah eksternal itu masih kurang. Belum memperhatikan masalah-masalah eksternal. Artinya fungsi jaringan belum terlalu ini, jadi fokus LDKnya masih internal. Jadi mikirkan jaringan keluar itu masih belum banyak porsinya. Nah tentunya kan gak kita paksakan. Dan itu yang terjadi di lapangan. **Kita tahu pasti kebutuhan mereka.** Kalau dilihat sekilas, antum dari luar ya”.

Pernyataan **kita tahu pasti kebutuhan mereka** menegaskan bahwa Puskomnas

lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masing-masing LDK itu padahal Puskomnas sendiri masih kesulitan mengumpulkan informasi dari LDK-LDK yang ada tentang apa yang mereka butuhkan. Lalu apakah pernyataan bahwa Puskomnas tahu pasti kebutuhan mereka itu bisa dibenarkan?. Jangan-jangan itu hanya sikap arogan dan elitis dari segelintir LDK, Puskomnas, BP Puskomnas. Di mana mereka berusaha mengumpulkan data-data, informasi dari bawah kemudian menganalisis data-data tersebut untuk mengetahui kebutuhan LDK-LDK, baru kemudian memberikan apa yang dibutuhkan itu. Seperti terdapat dalam pernyataan berikut “...*kita berpikir lebih ke langkah-langkah konkret kedepan ya, untuk analisis dokumen bukan ga dibutuhkan, ga terlalu penting atau perlu untuk LDK se-Indonesia. Jadi kita Puskomnas dari dokumen itu kita bisa mengambil kesimpulan dan BP untuk bagaimana ke depan..*”

Realistis saja, apakah itu bisa dilakukan. Dengan semua kendala dan keterbatasan-keterbatasan yang telah diuraikan panjang lebar di atas. Jika melihat bahwa FSLDK ini memang desainnya desain sepeda yang tidak mungkin dibawa berlari 100km/jam, mungkin saja semua mekanisme itu dimaklumi. Namun ini adalah lembaga dakwah kampus, yang progresif, militan dan mengusung idealisme yang agung, mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Lembaga dakwah kampus ini pun berada pada zaman di mana mobilitas sudah sangat tinggi, bukan hijrah memakai unta atau berjalan kaki, bukan berkomunikasi lewat burung merpati, bukan menghadapi satu dua orang tapi miliaran orang penduduk bumi. Lalu pertanyaannya di mana usaha untuk mengakomodasi, mengakselerasi fungsi-fungsi strategis itu?

Apabila memang masih ada kesulitan-kesulitan yang demikian banyak itu, maka kebijakan yang *topdown*, tertutup, pasif menunggu, sama sekali tidak tepat dan tidak sesuai pada tempatnya. Tidak tepat lagi jika Puskomnas dan BP Puskomnas bersikap elitis ketika mengolah data sendirian dan merancang sesuatu yang dianggap baik untuk LDK-LDK. Tidak ada pahlawan disini, tidak ada yang lebih tahu dan lebih benar untuk kemudian memiliki tanggungjawab untuk menjadi tuhan bagi yang lainnya, boleh memutuskan dan memilih mana yang terbaik untuk umat di bawahnya.

Analisis dokumen melalui berbagi *resources*, adalah budaya intelektual yang sangat penting untuk dimulai. Budaya analisis yang masuk dalam budaya riset tentu bukan hal yang asing bagi mahasiswa. Perlu skill dan kapasitas memang. Dan itu harus dimulai. Hal ini akan Al-Manär jelaskan terkait dengan MCP pada Bab berikutnya.

Dengan berbagi *resources*, sangat dimungkinkan akan ada upaya-upaya analisis dari LDK-LDK yang ada terhadap dokumen-dokumen tersebut. *Pertama* mereka akan melihat apakah dokumen tersebut bagus atau tidak, kemudian mereka akan melakukan pengkritisan-pengkritisan, *kedua* apakah mereka membutuhkan apa yang ada dalam dokumen tersebut atau tidak, seandainya dokumen tersebut belum sempurna maka mereka akan menyempurnakannya dengan memberikan tambahan-tambahan atau penyesuaian-penyempurnaan yang perlu, *ketiga* dari dokumen tersebut mereka akan menurunkan pada tahap-tahap teknis aplikasi, selanjutnya mereka dapat membuktikan sendiri apakah dokumen tersebut bermanfaat dan *mensupport* mereka atau tidak, mereka juga akan mendiskusikan dengan si pengide dokumen tersebut, dialog kemudian akan terus berlangsung untuk saling mengkritisi, memberi input-input yang bermanfaat bagi keduanya. Minimal berbagi *resources* akan memberikan inspirasi, wacana-wacana baru, alternatif-alternatif baru, yang

kemudian akan melahirkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat. Proses belajar, disini yang penting. Belajar untuk menganalisis, mengkritisi, merancang yang lebih baik dan mengaplikasikan dalam konteks mereka sendiri. Tentu selain membuka dialog yang lebih cerdas satu sama lain.

Itulah mengapa berbagi *resources* dan menganalisis dokumen itu penting bagi semua saja, bukan hanya bagi Puskomnas, BP Puskomnas atau LDK-LDK tertentu.

Lalu bagaimana caranya bisa berbagi *resources*. Membangun jaringan IT (Information Technology) yang bagus tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Menurut Puskomnas, ide tentang IT ini sempat muncul di FSLDK juga, namun seperti yang tadi dijelaskan, terlalu ideal, rumit, mahal dan SDM belum memungkinkan. Lalu apakah tidak ada jalan lain ?.

Al Manär yang hadir dalam format CD berusaha menepis ketidakmungkinan itu. *Open resources* mungkin untuk dilakukan dengan biaya terjangkau, oleh kantong mahasiswa sekalipun. CD adalah fasilitas paling murah dengan *space* yang sangat luas sehingga bisa menampung *resources* sebanyak-banyaknya dari LDK-LDK yang ada. CD juga mudah digandakan, ringan untuk didistribusikan kemana-mana, dapat dikemas dalam bentuk yang menarik, interaktif. Cukup dengan satu komputer, satu CD RW, satu scanner dan keping-keping CD yang murah. Pun bisa dikerjakan oleh satu dua orang saja, banyak LDK bisa melakukannya.

Ketika cara membuatnya mudah, distribusinya mudah, pemakaiannya juga mudah maka *resources-resources* dari LDK di ujung Sumatra dapat sampai di ujung Papua dengan mudah. CD bukan untuk mempopulerkan artis-artis yang telanjang, atau cerita mahasiswa-mahasiswi sedang bermesraan, atau casting iklan sabun cuci. LDK juga bisa memanfaatkannya untuk berbagi potensi.

D. Gagasan Prematur itu bernama MCP

Menurut Puskomnas, dalam wawancara Al-Manär dengan Puskomnas, “... MCP, itu lahir bulan Oktober 2002, sesudah rapat BP disini saat itu. BP Nas. Kita membreakdown, jadi berawal dari rekomendasi FSLDK Nas. Ada 3 komisi, masuk ke pembahasan isu nasional, di sana banyak sekali rekomendasi yang sifatnya penyikapan-penyikapan terhadap berbagai isu, dari kristenisasi, syariat islam, sampai moral, sampai jilbab dst, musuh global umat Islam. Nah disana, dalam pembahasan kita mengambil benang merah bahwa ini perlu ada semacam center, dari pengelola sampai output isu. Yang akhirnya muncul ide Media Center Puskomnas. Jadi intinya MCP itu mau digunakan sebagai wahana penyikapan terhadap rekomendasi FSLDK Nas. Terus ditunjuk MCP, JS UGM dengan konsep masih blank. Jadi saat itu masih arahan global saja. Dia tujuannya untuk mengelola isu-isu nasional, MCP. Setelah itu selesai, JS UGM dan UNS coba untuk merumuskan konsep dari tataran umum sampai teknis, bagaimana MCP bisa berjalan. Saat itu konsep jadi, dan bulan Juni akan mulai digerakkan. Juni 2003..”

Konsep Media Center yang berhasil dirumuskan oleh JS UGM dan JN UKMI UNS tersebut dapat pembaca lihat di menu **Related Documents**.

Tidak banyak data-data yang Al-Manär dapatkan sehubungan dengan MCP ini. Akan tetapi kita bisa memulainya dengan melakukan analisis terhadap konsep Media Center Puskomnas tersebut. Jika melihat konsep tersebut sekilas saja, dapat diketahui bahwa konsep tersebut belum jelas. Ketidakjelasan tersebut terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

a. Definisi Media Center

Di sana tidak dijelaskan bentuk rigid media center yang dimaksud. Sama sekali tidak ada kalimat yang mendefinisikan secara gamblang media center itu apa. Hanya ada deskripsi singkat diakhir draft tersebut yang tidak menjelaskan Media Center itu sendiri seperti apa.

b. Fungsi

Isu Nasional

Fungsi-fungsi MCP seperti disebutkan diatas belum menjelaskan misalnya tentang batasan isu nasional dan spesifikasi isu yang dimaksud. Artinya, isu-isu apa yang boleh dan tidak boleh disikapi, beserta alasan-alasan mengapa demikian. Ketika batasan isu tersebut masih belum jelas maka akan menyulitkan kerja MCP. Jika memang MCP lahir sebagai follow up dari adanya isu-isu nasional yang direkomendasikan di FS nasional, maka kita perlu melihat isu macam apa yang direkomendasikan tersebut.

Data yang kami miliki menyebutkan, hasil-hasil sidang komisi FSLDK XII di universitas Andalas Padang, 25-29 juli 2002, dalam hal ini komisi isu-isu nasional, terdapat tujuh point isu yang dapat pembaca lihat di menu **Related Documents**.

Permasalahan LDK

Selain isu nasional, seperti disebutkan dalam konsep media center tersebut, MCP juga memroses permasalahan LDK. Padahal seperti yang bisa dilihat, enam point fungsi dalam draft media center diatas sama sekali tidak menyebutkan permasalahan LDK, jadi hanya ada isu nasional saja. Demikian juga dalam tujuan dan target. Sama sekali tidak ada *point* yang menyinggung tentang Permasalahan LDK yang dimaksud.

Akan tetapi pada *point* pertama fase proses disebutkan, melakukan pemetaan terhadap permasalahan tersebut dan mencari pemecahan masalah melalui pendekatan yang sepenuhnya diserahkan kepada LDK yang menjadi MCP. Memetakan masalah sekaligus mencari solusinya jelas bukan pekerjaan main-main yang bisa dilakukan secara sederhana, apalagi karena batasan permasalahan yang akan diproses tersebut juga tidak dijelaskan dan tidak disebutkan dalam fungsi MCP.

Seperti diuraikan dalam liputan ini pada bab open resources, permasalahan LDK sangat banyak dan beragam. Permasalahan yang umum, khas, insidental saja, internal, atau berhubungan dengan pihak luar, atau permasalahan seperti apa. Setiap permasalahan itu tentu untuk sekedar memetakan saja banyak syarat dan perangkat yang sudah harus ada di MCP. Kemampuan riset yang baik harus dimiliki oleh MCP. Apakah MCP memilikinya, apakah kemudian FSDLK mengusahakan MCP mendapatkan syarat-syarat tersebut untuk mempermudah tugasnya, atau malah MCP sendiri yang harus bekerja keras agar fungsi tersebut dapat dijalankan. Setidaknya harus ada kejelasan di sini tentang siapa, apa, dan bagaimana MCP bekerja, minimal.

Penelitian dan pengembangan

Kemudian bentuk konkret dari fungsi penelitian dan pengembangan Apakah dalam hal ini sama dengan fungsi-fungsi Litbang di lembaga-lembaga. Jika demikian tentu harus dijelaskan lagi bagaimana syarat-syarat sebuah litbang agar fungsi tersebut bisa tercapai.

Filter isu nasional

Kemudian fungsi filter isu nasional, maksudnya apa? mengapa isu nasional perlu disaring, dengan konsep, standar dan dengan cara apa isu tersebut disaring. Artinya belum jelas disini filter yang dimaksud.

Media informasi yang up to date

Untuk menjadi media informasi yang *up to date*, secara objektif ada banyak syarat yang juga harus dipenuhi oleh MCP. Setidaknya ia harus punya *database*, sistem informasi yang jelas, link ke berbagai media informasi yang lain, *connect* ke internet, dan ia juga harus bisa diakses setiap saat, agar informasi-informasi *up to date* yang dimilikinya dapat tersampaikan. Apakah kemudian ada setidaknya konsep yang jelas untuk mengusahakan tercapainya MCP sebagai Media Informasi yang *up to date* tersebut?

Adanya pendefinisian yang tidak konsisten di dalam sumber data yang lain

Selain fungsi-fungsi yang disebutkan di dalam konsep tersebut, Al-Manär menemukan ketidakkonsistenan dalam pendefinisian MCP didalam data yang kami dapatkan, yaitu Sosialisasi Puskomnas JN UKMI UNS, pada Bab tentang Hasil Syuro' BP Puskomnas 1. Dilaksanakan pada tanggal 25-27 Oktober 2002 di Masjid Nurul Huda UNS. Agenda Syuro' BP I meliputi: pembentukan BP Puskomnas 2002/2005 dan pembahasan hasil-hasil FSLDKN XII. Disana disebutkan *MCP berfungsi mengelola isu- isu nasional dan kemudian hasil kajian MCP diopinikan ke masyarakat untuk membangun wacana masyarakat melalui media massa dan atau sikap yang harus dilakukan oleh LDK terhadap permasalahan yang ada* (hal.22)

Sementara pada halaman yang berbeda dalam Bab tentang Kegiatan Puskomnas dalam merealisasikan hasil FSLDKN XII, disebutkan *Dalam menyikapi isu-isu nasional yang berkembang saat ini, Puskomnas membentuk MCP (Media Center Pusat) dan menunjuk UGM untuk menjalankannya. MCP ini berfungsi mengumpulkan informasi, memblow up dan mendistribusikan isu-isu yang sedang berkembang* (hal.25)

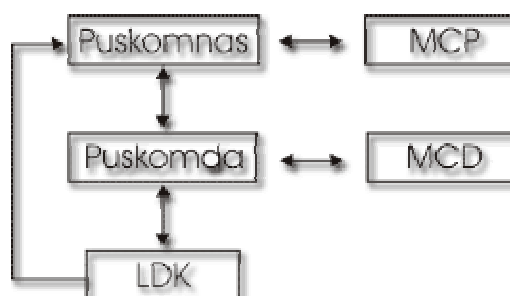
Lalu yang mana yang benar? dengan kalimat yang sama saja bisa didapatkan intepretasi yang berbeda, apalagi jika kalimatnya berbeda, padahal ini masih dalam satu sumber data.

Fungsi yang terakhir ini kemudian juga tidak sinkron dengan konsep media center diatas. Yaitu bahwa MCP berfungsi mengumpulkan informasi. Padahal di konsepnya pada poin 2 dan 3 fase input disebutkan informasi yang masuk dalam fase input ditangani oleh Puskomnas dan BP Puskomnas. Jadi bukan MCP yang mengumpulkan informasi, karena suplai informasi dilakukan dan menjadi tugas Puskomnas. Kemudian tentang fungsi distribusi, berbeda lagi dengan konsepnya yaitu di fase output point ke 2, hasil dari input yang berupa permasalahan LDK yang

telah melewati fase proses ditransfer kembali kepada Puskomnas untuk didistribusikan ke wilayah asal informasi tersebut. Pertanyaannya disini apakah untuk isu-isu nasional juga Puskomnas yang mendistribusikan seperti pada permasalahan LDK?

Karena seperti yang dijelaskan dalam Draft temu Puskomda se-Indonesia, tentang Media Center Daerah (hal.8). Terdapat disitu alur komunikasi antara MCP dan MCD melalui alur komunikasi Puskomnas-Puskomda sebagai berikut:

Alur Komunikasi :



Dari skema alur komunikasi di atas sudah jelas bahwa MCP berhubungan dengan Puskomnas langsung, termasuk juga dalam distribusi. Namun ini menjadi tidak sinkron dengan fungsi-fungsi lain yang disebutkan di atas. Misalnya saja tentang MCP sebagai Media Informasi yang *up to date*. Karena dengan pola komunikasi di atas di mana MCP hubungannya hanya dengan Puskomnas, otomatis ia juga tidak dalam porsi bisa diakses oleh publik untuk mengetahui informasi *up to date* tersebut. Ia bukan media yang berdiri sendiri menjalankan fungsi-fungsi tadi, namun hanya media yang membantu kerja Puskomnas mengolah isu, memetakan masalah LDK dan mencari solusinya, karena apapun kemudian yang dihasilkan oleh MCP, untuk bisa sampai ke LDK harus melalui Puskomnas.

Hal ini juga diakui oleh Puskomnas dalam wawancara kami dengan Tim Puskomnas, *"..Karena meski pun dari MCP pun ketika bentuknya instruksi atau rekomendasi itu kan masuknya ke Puskomnas dulu. Jadi kayak apa ya, MCP itu nanti lebih ke jaringan diluarnya, tapi kalo rekomendasi ke LDK tetap melalui jalur Puskomnas. Melalui milist dsb. Melalui jalur resmi yang biasa kita gunakan. Puskomnas ke Puskomda semacam itu"*.

Ketidaksinkronan di atas dapat menjadi fatal karena pendefinisian fungsi-fungsi yang ada mempengaruhi definisi MCP, kinerja, tanggungjawab dan wewenang-wewenangnya. Ketika dalam menyebutkan fungsi MCP saja sudah tidak konsisten maka bagaimana kemudian fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan. Fungsi yang mana, menurut definisi siapa.

Berbicara soal fungsi saja, ternyata masih banyak yang harus dipertanyakan dari data-data yang ada. Yang jelas secara keseluruhan memang tidak ada pendefinisian yang pasti tentang fungsi-fungsi tadi, termasuk juga langkah-langkah bagaimana fungsi tersebut bisa dijalankan oleh MCP. Logikanya sesuatu itu dibuat atau diadakan karena ia memang dibutuhkan, dibutuhkan karena fungsi-fungsi tersebut. Karena itu selain sesuatu itu harus jelas, fungsi-fungsinya pun harus jelas. Di samping langkah-langkah konkret agar fungsi tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

c. Tujuan dan target

Selain fungsi-fungsi yang masih harus dipertanyakan, target dan tujuan dalam draft tersebut juga perlu dipertanyakan. Misalnya saja seperti yang tadi sempat disinggung, tentang permasalahan LDK yang juga menjadi input untuk di proses oleh MCP, yang artinya juga masuk dalam pekerjaan yang harus dilakukan MCP ternyata sama sekali tidak disinggung di sini. Tidak masuk dalam target dan tujuan, padahal ini penting. Selain itu dalam perumusan target dan tujuan tidak dijelaskan secara rigid tentang target-target isu, *scheduling*, deadline dan sebagainya di mana kejelasan agenda tersebut juga penting agar dapat diketahui, minimal oleh MCP sendiri, MCP sudah memenuhi target dan tujuan tersebut atau belum.

Karena itu dibutuhkan mekanisme kerja yang jelas bukan sekedar menyebutkan proses, seperti yang bisa dilihat dalam Konsep Media Center tersebut. Mekanisme kerja disini meliputi alur kerja dari input sampai out put, siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, sekaligus adanya *monitoring* dan evaluasi. Dijelaskan juga kapan waktu monitoring dan evaluasi tersebut dan siapa yang berhak melakukannya.

d. Alur logika

Terakhir, dari konsep di atas yang bisa disimak adalah adanya alur logika yang berisi input, proses hingga output.

Input

Fase input disebutkan ditangani oleh Puskomnas dan BP Puskomnas melalui media yang ada yaitu milis. Mengapa harus Puskomnas dan BP Puskomnas dan mengapa harus melalui milis. Tidak dijelaskan juga, bagaimana caranya LDK memberikan informasi isu tersebut apakah melalui milis tadi? Jika demikian bagaimana efektifitasnya, apakah mungkin isu nasional yang disampaikan LDK dapat direspon dengan cepat? Selain itu, input yang berupa permasalahan LDK pasti berasal dari LDK, bagaimana LDK menyampaikannya, apa melalui media yang sama? Dengan keterbatasan komunikasi, ketidakterbukaan, ketidakpopuleran FSLDK itu sendiri, kemudian bagaimana LDK-LDK memberikan input pada Puskomnas atau BP Puskomnas tersebut, bagaimana alur yang dibangun? Apakah kemudian Puskomnas dan BP Puskomnas mengambil asumsi-asumsi sendiri dari isu-isu dan permasalahan yang ada dan menjadikan sebagai input untuk MCP. Perlu dipertanyakan di sini juga bentuk dari input tersebut. Karena itu kemudian batasan isu nasional dan permasalahan LDK perlu untuk dibuat beserta spesifikasinya. Bentuk yang Al-Manär maksud adalah apakah sekedar informasi ada isu atau permasalahan LDK saja, semacam pemberitahuan singkat, 5 W + 1 H, atau berikut referensi-referensi terkait isu atau permasalahan tersebut, misalnya data-data dari media, jurnal, buku-buku, dalam hal ini data sekunder yang dibutuhkan dalam analisis. Sejauh mana kemudian suplai informasi yang dimaksud disini.

Selain itu, adakah pembagian wilayah kerja yang jelas antara MCP dan MCD? Apakah MCP dan MCD juga berhubungan? Dalam hal ini untuk konfirmasi, kerjasama, atau yang lainnya.

Masih berkaitan dengan input, disebutkan di sana Puskomnas mensuplai informasi kepada MCP melalui media khusus yaitu telepon dan email. Jika melalui telepon dapat diperkirakan disini bahwa input informasi tersebut bukan berupa data-data sekunder, mungkin hanya berupa pemberitahuan saja, atau rekomendasi-rekomendasi lain. Selain itu yang juga harus dipertanyakan di sini adalah seberapa

tingkat efektifitas dari pola komunikasi tersebut. Mengapa MCP mengakses setiap pekan pada hari sabtu untuk melihat data yang masuk (di sini berarti melalui email). Apakah nanti tidak terlambat dan informasinya kemudian menjadi tidak up to date?.

Proses

Dalam fase proses disebutkan MCP melakukan penyaringan terhadap informasi. Dalam hal ini berarti input yang masuk tidak semua harus diolah atau ditindaklanjuti. Padahal dalam konsep yang sama tersebut belum disepakati batasan input dan spesifikasinya, jadi yang dipertanyakan selanjutnya di sini, dengan standar apa MCP melakukan penyaringan.

Kemudian disebutkan juga pemecahan masalah melalui pendekatan yang sepenuhnya diserahkan kepada MCP. Pendekatan seperti apa yang dimaksud, bagaimana seandainya pendekatan tersebut tidak disetujui oleh Puskomnas.

Kemudian pada point kedua, mengapa fase proses ini selambat-lambatnya dilakukan 10x24 jam oleh MCP. Apa pertimbangannya ditetapkan batas waktu pemrosesan 10 hari?

Output

Pada fase out put disebutkan adanya uji kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan uji kesimpulan di sini, bagaimana prosedur pengujiannya dan siapa yang kemudian akan melakukannya. Berarti membutuhkan adanya tim penguji khusus yang memiliki kapasitas dengan isu nasional dan permasalahan LDK yang diangkat, jika memang benar-benar akan dilakukan, untuk mencapai output yang benar-benar *qualified*.

Point berikutnya, mengapa hasil dari input yang berupa permasalahan LDK ditransfer kembali ke Puskomnas, mengapa tidak langsung didistribusikan oleh MCP, apakah ini efektif, apa pertimbangan dibuat alur demikian?

Kemudian disebutkan juga bahwa hasil input yang berupa isu nasional dilakukan pemeriksaan oleh Puskomnas untuk diberikan pertimbangan dan catatan-catatan jika perlu dalam waktu 2x24 jam. Di mana pemeriksaan tersebut tidak serta merta membatalkan keputusan yang dihasilkan MCP. Mengapa Puskomnas merasa perlu untuk memeriksa, dan dengan waktu 2x24 jam tersebut apa pertimbangannya, apakah tidak semakin memperlambat sampainya hasil tersebut pada LDK-LDK yang ada? Lalu seandainya kemudian MCP dan Puskomnas tidak sejalan sementara pemeriksaan tersebut tidak serta merta mengubah hasil MCP, siapa kemudian yang berhak menentukan apa yang akan disampaikan ke LDK-LDK, apakah ada standar tertentu yang dibuat tentang apa yang dihasilkan MCP tersebut, untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara MCP dan Puskomnas tentang hasil MCP itu.

Terakhir, terdapat di konsep tersebut bahwa keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk dicetuskannya suatu sikap selambat-lambatnya adalah 19 hari. Sekali lagi Al-Manär mempertanyakan pertimbangan waktu tersebut, apakah terlalu lama atau justru kurang. Karena standar isu dan permasalahan juga tidak ada, apakah itu adalah isu-isu yang berat, permasalahan-permasalahan yang berat yang membutuhkan analisis yang panjang atau hanya berupa isu dan permasalahan ringan saja.

Dari sedikit analisis terhadap draft konsep MCP yang menjadi rujukan dalam pengelolaan MCP selama ini, muncul banyak pertanyaan, yang bisa lebih banyak lagi sebenarnya. Draft tersebut akhirnya dapat dikatakan belum sempurna untuk menjadi sebuah acuan, sebuah kesepakatan bagaimana Media Center itu akan dijalankan.

Draft tersebut, seperti kita lihat sudah dibuat lewat setahun yang lalu. Pertanyaannya di sini, apa yang terjadi pada MCP selama berdirinya, selama masa kerjanya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan pengkritisan terhadap MCP, Al-Manär telah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu Puskomnas dan JS UGM sebagai MCP, sekaligus berusaha meminta data-data sekunder untuk dianalisis. Al Manär berhasil melakukan wawancara dengan Puskomnas dan ketua JS UGM saat ini. Namun hal tersebut tidak maksimal ketika yang berkompeten dalam hal ini yang berhubungan dengan MCP yaitu departemen HAL JS UGM tidak bersedia untuk dimintai keterangan dengan alasan MCP sudah dibahas tuntas bersama Puskomnas, sesaat sebelumnya. Karena MCP telah diamanahkan ke JS sejak periode sebelum kepengurusan sekarang, Al-Manär juga berusaha menghubungi langsung pelaku sejarahnya, yaitu ketua JS sebelumnya, Yanuar Reza Yulias, namun yang bersangkutan juga tidak bersedia diwawancarai dengan alasan sudah tidak up to date lagi untuk menjelaskan tentang MCP. Akhirnya dengan keterbatasan yang ada Al-Manär tetap berusaha memperoleh informasi dan mengolahnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan, dan semoga yang sedikit ini juga dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

MCP, ANTARA KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Dari hasil wawancara dengan Puskomnas, ada beberapa permasalahan yang kemudian mencuat sehubungan dengan implementasi MCP. Berikut adalah pengakuan Puskomnas, *“...JS UGM dan UNS coba untuk merumuskan konsep dari tataran umum sampai teknis, bagaimana MCP bisa berjalan. Saat itu konsep jadi, dan bulan Juni akan mulai digerakkan. Juni 2003. Setelah itu dengan berbagai permasalahan, terutama yang paling ini mungkin masalah internal di JS, saya juga kurang tahu, yang kemudian, kekurangan SDM mungkin di MCP, yang kemudian cukup menghambat kerja-kerja MCP. Dan untuk isu-isu nasional sementara masih, selama ini dihandle langsung oleh, ya sebagian besar ya, ada beberapa yang sudah coba dihandle MCP, tentang pengelolaan MCP itu. Sebagian besar masih ditangani Puskomnas secara langsung. Sebagian besar. Jadi ga berhenti gitu, dengan agak MCP masih dalam tataran apa ya, ya kami memahami. Masih tataran proses, meskipun konsep sudah jadi, ternyata implementasi masih kesulitan, dari datangnya isu, yang sebenarnya isu itu ga harus dari Puskomnas, MCP bisa cari sendiri data dari berita-berita. Dan sebenarnya ga cuma reaktif, kalau bisa memunculkan isu-isu juga terkait rekomendasi isu-isu itu. Misalnya tentang kristenisasi, blow up kesadaran masalah pemurtadan, masalah syariat Islam, bagaimana bisa terblow up kesadaran ke masyarakat agar memahami pentingnya syariat Islam. Sebenarnya seperti itu, tapi saat ini masih dihandle Puskomnas, dan Puskomnas yang ditangani banyak, sehingga kita cenderung masih reaktif. Jadi belum bisa memunculkan isu sendiri, terus ter blow up, itu kita belum bisa. Karena kita ada keterbatasan sumberdaya. Puskomnas juga ngurusinnya ga cuma itu. Biasanya cuma dihandle oleh komisi isu, komisi isu nasional...”*

Dari penuturan Puskomnas tersebut dapat diturunkan beberapa poin yang penting, yaitu, MCP Belum Berjalan dan karenanya masih dihandle Puskomnas, Puskomnas tidak tahu mengapa MCP belum berjalan, dan isu-isu diakui masih reaktif.

Ketika konsep dari tataran umum sampai teknis sudah dibuat dan MCP kemudian masih kesulitan sehingga kerja-kerjanya sebagian besar masih ditangani oleh Puskomnas maka pasti ada yang salah, jika bukan konsepnya yang masih belum jelas sehingga tidak dapat dijadikan acuan kerja oleh MCP, maka berarti aktor, orang-orang di dalam MCP sendiri memang belum punya kapasitas untuk mengelola MCP. Atau, bisa jadi malah kedua-duanya.

Sudah diuraikan di atas beberapa analisis yang coba Al-Manär lakukan terhadap konsep media center yang dibuat oleh JS UGM dan Puskomnas, dan memang ada banyak kekurangan. Bahwa ide adanya MCP merupakan sebuah ide yang sangat bagus, harus diakui, akan tetapi untuk mewujudkannya perlu dibuat konsep yang lebih baik dari konsep yang ada sekarang. Dalam hal ini perlu ada perumusan ulang baik dalam definisi, fungsi, batasan kerja, desain model, alur mekanisme kerja yang jelas, dan serangkaian upaya strategis untuk melakukan fungsi-fungsi tadi, baik dalam instrumen-instrumen pendukung maupun SDM. Karena memang ada beberapa syarat objektif yang harus dipenuhi untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut.

Untuk itu Al-Manär akan coba memberikan sedikit ilustrasi konsep Media Center ideal menurut Al-Manär.

MCP sebagai *think tank*, ia menjalankan fungsi-fungsi litbang. Fungsi-fungsi ini meliputi setidaknya sebagai bank data dari macam-macam informasi, di mana bank data ini bisa diakses kapanpun, oleh siapapun, dan data-data yang dimilikinya tentu saja memenuhi syarat untuk bisa dijadikan referensi di mana validitas diperlukan.

Untuk bisa diakses, dan bisa mengakses dengan cepat, agar informasi-informasi yang dipunyai selalu *up to date*, maka MCP ini membutuhkan perangkat IT seperti internet, ia juga harus membangun jaringan dengan media-media informasi yang memiliki database untuk bisa *support* dan memberikan input-input yang aktual. Jaringan dan kerjasama perlu dibangun dengan lembaga-lembaga, pusat-pusat kajian, organisasi-organisasi yang dapat mendukung kerja-kerja MCP, tidak hanya dalam input data, tapi juga untuk belajar bagaimana mengolah isu, menganalisis isu, melakukan riset, polling, dan sebagainya selain memberikan banyak wacana-wacana segar yang dapat memperkaya mereka.

Sebagai media yang juga memposisikan dirinya menjadi “corong” LDK-LDK dalam menyuarakan sikap dan hasil-hasil analisisnya, maka MCP juga perlu publikasi yang bagus. MCP bisa membuatnya sendiri dengan *website* yang bisa diakses tadi, membuat jurnal virtual misalnya, dan agar semua LDK bahkan yang susah untuk mengakses internet tidak ketinggalan informasi, maka MCP juga bisa membuat produk seperti CD Al-Manär ini misalnya, atau jurnal-jurnal konvensional lain, yang pasti tentu tak sekedar bulletin, seperti bulletin juma’t. Selain memproduksi publikasinya sendiri, MCP bisa bekerjasama dengan media lain seperti radio-radio lokal, minimal radio-radio kampus seperti di UGM ada Swaragama.

Seperti tadi diakui oleh Puskomnas bahwa penyikapan terhadap isu-isu yang ada

masih bersifat reaktif maka ada banyak hal yang kemudian harus dibenahi untuk tidak seperti itu. Untuk sekedar memetakan sebuah isu, bukan hal yang mudah. Sebagai litbang, maka MCP harus memiliki kemampuan riset dan kemampuan analisis yang baik. Pertama aktor-aktor MCP harus membuka diri dari berbagai informasi, ilmu, gagasan-gagasan, wacana-wacana yang ada. Dalam ilmu sosial sendiri ada banyak sekali paradigma yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memetakan, menganalisis suatu persoalan. MCP berhubungan dengan publik, realitas sosial, dimensi-dimensi masyarakat yang dinamis, persoalan-persoalan lokal dan global yang tidak bisa dipandang dari satu perspektif saja. Akan menjadi tidak ilmiah ketika MCP menganalisis sesuatu dengan cara pandang yang parsial, simplistik apalagi sekedar membuat asumsi-asumsi yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid. MCP akan menjadi “asbun” saja, seandainya apa yang dihasilkan kemudian diperdebatkan dihadapan publik bisa jadi MCP hanya akan dianggap menyebarkan fitnah.

Sampai saat ini, seperti yang ditulis oleh koordinator Puskomnas, Moh. Eko, dalam Lembaga Dakwah Kampus Nasional Pasca FSLDKN XII di Universitas Andalas Padang “Menuju Progresivitas dan profesionalitas Dakwah kampus”, isu-isu yang sudah diangkat seperti yang disebutkan dalam boks di samping .

Dari isu-isu yang diangkat tersebut memang kesemuanya masih reaktif, insidental saja. Tidak masalah ketika pernyataan sikap tadi misalnya dihasilkan dari sebuah analisis yang dalam, misalnya ketika bicara tentang RUU Sisdiknas, maka berarti juga berbicara tentang sistem pendidikan nasional, berbicara tentang hukum, tentang politik dan ekonomi, bahkan juga bicara tentang globalisasi. Apakah kemudian sebelum mengeluarkan suatu bentuk pernyataan sikap, sebelumnya sudah dilakukan upaya-upaya untuk memahami, menganalisis, menelaah berbagai masalah yang saling berhubungan tadi. Tidak bisa bicara pendidikan tanpa bicara politik, ekonomi, negara, bahkan konstelasi dunia. Atau contoh yang lain, ketika memunculkan pernyataan sikap tentang perang AS-Irak, apakah kemudian sebelumnya telah diupayakan analisis yang tajam, pertama mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, menganalisis dan melihat dari berbagai perspektif. Sosiologi misalnya, ia bisa memandang perang Irak-AS sebagai bagian dari neo-imperialisme, neo-kolonialisme, perebutan sumber daya minyak, sementara yang lainnya akan bicara tentang pelanggaran HAM, bukan hanya isu agama saja. Jadi, sebelum mengambil sikap, menentukan di mana posisi sebagai LDK dalam menyikapi permasalahan yang ada, menentukan

1. Pernyataan sikap dan aksi solidaritas Irak pada Bulan Maret dan April 2003 mengutuk AS dan sekutunya.
2. Penggalangan dana kemanusiaan Irak selama bulan maret 2003
3. Penggalangan dana kemanusiaan solidaritas Aceh pada bulan Juni 2003
4. Aksi mendukung disahkannya RUU SISDIKNAS pada bulan Mei 2003
5. Penggalangan tanda tangan segera disahkannya RUU SISDIKNAS pada bulan Mei- Juni 2003
6. Penggalangan tanda tangan kasus jilbab di Udayana menolak pelarangan jilbab di Udayana pada bulan November 2002-2003
7. Aksi simpatik jelang ramadhan stop maksiat pada bulan oktober 2003
8. Pernyataan sikap perpanjangan darurat militer Aceh pada bulan November 2003
9. Penggalangan dana kemanusiaan banjir dan

keberpihakan, sebelumnya harus ada upaya-upaya untuk memahami persoalan dengan baik, karena setiap sikap yang diambil ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya. MCP harus bisa membedakan antara sikap-sikap yang kritis dengan yang sekedar reaktif.

Syarat sebuah litbang yang berikutnya, selain kemampuan analisis, MCP juga memerlukan skill riset lapangan yang baik, dalam riset kuantitatif maupun kualitatif.

tanah longsor di Sumatera utara pada bulan November 2003

10. Aksi menolak pelarangan jilbab di Perancis pada bulan Februari 2004
11. Aksi solidaritas Palestina pada bulan Maret dan April 2004
12. Penggalangan dana kemanusiaan Palestina mulai bulan Maret 2004
13. Aksi seruan kampanye damai pada bulan Maret 2004
14. Aksi seruan 'umat Islam bersatulah, gapai kemenangan' pada bulan April 2004 di pemilu 2004

MCP idealnya menguasai metodologi riset yang benar, dari membuat hipotesa, menentukan variabel-variabel, hingga mengkode data, membuat analisis hingga menyusun laporannya. MCP harus tahu metode wawancara yang baik, membuat kuesioner, dan lain sebagainya.

Semua itu jelas tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Karena kita berbicara dalam konteks mahasiswa, yang notabene analisis dan riset bukan suatu hal yang asing.

Selanjutnya apakah MCP atau puskomnas FSLDK sudah memikirkan ke arah sana, dan terus mengupayakan usaha-usaha, langkah-langkah strategis untuk mencapai idealisme mereka?

Dari hasil wawancara Al-Manär dengan Puskomnas, memang sudah ada kesadaran untuk mengubah paradigma yang selama ini ada terhadap penyikapan isu yang diakui masih reaktif dan insidental, *"..Kenapa harus muncul MCP, selama ini yang kita garap dari tim isu hanya sekedar sikap yang reaktif terhadap isu-isu yang ada. Dan kita kan menginginkan isu itu kita bisa ikut mempengaruhi isu global yang ada, jadi kita bisa memunculkan isu itu. Ketika memunculkan isu itu membutuhkan proses, sebuah mekanisme yang cukup panjang. Mengelola sebuah isu kan membutuhkan skill seperti itu, sebuah konsentrasi intensitas yang lebih banyak, daripada sekedar menyikapi isu-isu yang ada. Kalo antum pernah lihat, di sini kan yang ada banyak yang sifatnya reaktif kan, nah kita ingin merubah paradigma itu sebenarnya. Dari FSLDK sebelumnya, yang kita lihat kan isu-isu yang ada yang insidental dan sangat reaktif sekali ya, kalo kita bisa memanfaatkan misalnya MCP itu bisa kita manfaatkan ketika benar-bener ingin merubah paradigma itu..."*

Al-Manär pun sempat dalam wawancara itu menyampaikan gagasan ideal MCP yang diuraikan di atas, dan Puskomnas mengatakan bahwa ini adalah masukan yang

berharga buat MCP dan ke depannya bisa jadi hal-hal seperti itu dilakukan. Diakui juga oleh Puskomnas bahwa hal-hal seperti itu belum dan menurut mereka tidak mungkin cepat, butuh proses.

Persoalan selanjutnya, selain belum terwacanakan suatu pembahasan dari idealisme di atas yang diwujudkan dalam konsep-konsep yang lebih baik, ada persoalan lain menyangkut mekanisme yang belum berjalan di dalam FSLDK itu sendiri. Dalam hal ini merujuk pada pengakuan Puskomnas yang menyatakan bahwa MCP masih dihandle oleh mereka.

Ketika kemudian MCP belum melakukan fungsinya, seharusnya Puskomnas mengetahui alasan-alasan mengapa fungsi tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan, setelah mengetahui persoalan yang menjadi kendala tersebut, MCP dan Puskomnas, minimal dapat mengupayakan segera solusi-solusinya, apakah MCP belum berjalan karena konsepnya tidak jelas, kurangnya sumber daya, perbedaan paradigma, atau apa. Masalah-masalah tersebut seharusnya bisa saling dikomunikasikan, walaupun tidak ada hubungan struktural yang mengikat di dalam FSLDK itu sendiri.

Ketika Al-Manär menanyakan tentang kontrol, *monitoring*, evaluasi dan adanya report formal MCP sehubungan dengan kerja-kerjanya, Kendala-kendalanya, Puskomnas menjawab, “...kontrol terhadap MCP kita sebenarnya rutin ya, ada komisi isu yang memang ngontrol semua. MCP, JAMAAT, PKS, ada tim. Dan untuk pembicaraan serius, di awal konsep kita secara serius terlibat. Dan untuk kontrol, kita silaturahmi juga kita beberapa kali membicarakan MCP. JS juga beberapa kali kesini. Tapi untuk laporan formal memang kita tidak ada..”

Lalu sejauh mana intensitas kontrol tersebut, karena Puskomnas menyampaikan, “...kontrol terhadap MCP beberapa kali kita melakukan. Terakhir secara resmi Desember. Terus kemarin kita ketemu juga pas FSLDK Daerah, di UPN, Februari. MCP tentang pembahasan bulletin MCP. Kalau secara resmi kita kunjungan ke JS sendiri terakhir bulan Desember”.

Pertanyaannya kemudian apakah kontrol tersebut mencukupi, dan bagaimana kualitas kontrol yang dilakukan, karena buktinya sampai kemarin ketika Al-Manär menanyakan MCP ini kepada puskomnas, Puskomnas tidak tahu pasti permasalahan yang menyebabkan MCP belum berjalan. Puskomnas hanya mengetahui ada permasalahan internal, seperti dalam pengakuan berikut, “... ya karena kendala-kendala tadi, hambatan-hambatan internal yang, kami kurang tahu juga ya, internalnya juga saya ga punya wewenang atau kekuatan untuk tanya internalnya seperti apa, saya ga ngurusi masalah dalam. Tapi mulai akhir-akhir ini kita evaluasi, bahkan kita mau beberapa kali evaluasi ya...”

Lalu ketika ada keterbatasan tadi sikap yang kemudian diambil oleh Puskomnas justru mengambil alih MCP untuk dia kerjakan, seperti yang terlihat pada penjelasan berikut, “....MCP itu sebenarnya diharapkan bisa bantu kerja kita. Tapi karena kondisi yang tidak mungkin maka banyak sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Akh Eko, kita banyak yang handle dan saya pikir ga masalah. Karena meski pun dari MCP pun ketika bentuknya instruksi atau rekomendasi itu kan masuknya ke Puskomnas dulu. Jadi kayak apa ya, MCP itu nanti lebih ke jaringan di luarnya, tapi kalo rekomendasi ke LDK tetap melalui jalur Puskomnas. Melalui milist dsb.

Melalui jalur resmi yang biasa kita gunakan. Puskomnas ke Puskomda semacam itu. Ketika pun MCP sampai saat ini belum secara konkret bukti kerjanya belum banyak kita lihat, tapi ketika itu bisa dilakukan oleh tim isu nasional, saya pikir tidak terlalu bermasalah semacam itu. Ya mungkin itu bisa banyak masukan buat ke depan untuk MCP itu sendiri. Mungkin itu."

Mengapa bisa ada sikap demikian, lalu di mana kemudian itikad baik untuk menyelesaikan persoalan. Akan sangat berbeda sekedar tahu dan memahami dengan memahami dan peduli. Seperti berikut ini yang disampaikan Puskomnas, *"...kalo untuk menutupi kelemahan atau kekurangan, kita tadi, langsung menghandle untuk menyikapi isu-isu itu. Sementara kita lakukan. Artinya ga berhenti gitu lho, dengan ada tidak, dengan masih prosesnya MCP, kita tetap jalan. Jadi kita anggap dan pahami bahwa MCP sekarang masih proses.."*

Jika memang demikian pertanyaannya sekarang sampai kapan proses tersebut akan dibiarkan berjalan, setidaknya harus ada target yang jelas kapan MCP bisa berjalan. Tentang hal ini Puskomnas menjawab, *".. kalo target awal MCP jalan itu Juni 2003 ya."*

Dari pengakuan-pengakuan diatas, Al-Manär melihat, selain belum ada mekanisme yang jelas meliputi evaluasi, kontrol, monitoring dari Puskomnas ke MCP, tidak ada report, juga ada ketidakpasan disini, terkait dengan pengambilalihan begitu saja fungsi MCP oleh puskomnas ketika MCP belum berjalan, dan bukannya kemudian mencari mekanisme alternatif untuk mengusahakan MCP dapat melakukan tugasnya. Akan sangat aneh, ketika pada prinsipnya MCP diadakan untuk membantu kerja Puskomnas yang artinya disadari bahwa Puskomnas kesulitan karenanya butuh dibantu MCP, namun karena MCP belum berjalan dan Puskomnas merasa masih bisa *menghandle* pekerjaan MCP Puskomnas kemudian tidak berusaha mencari alternatif agar MCP, lembaga yang dilahirkan bersama-sama BP Puskomnas ini bisa melakukan fungsi itu. Lalu di mana kemudian pertanggungjawaban Puskomnas sebagai pemberi amanah. Apakah kemudian ketika Puskomnas saat ini belum merasa "membutuhkan" MCP, lalu biarlah kemudian MCP berproses "entah sampai kapan" toh semua masih bisa dilakukan sendiri. Ini akan menjadi tidak adil untuk semuanya. Melahirkan sesuatu dengan prematur dan ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan maka membiarkannya begitu saja.

Selanjutnya, bagaimana kemudian JS menanggapi MCP disini?. Seperti yang sudah disampaikan diatas, Al-Manär tidak mendapatkan banyak informasi dari orang-orang yang kompeten tentang MCP di JS. Akan tetapi dari wawancara Al-Manär dengan Huda, ketua JS saat ini, Huda menjelaskan, *"... munculnya MCP dengan proses yang intinya dulu kita menangkap bahwa itu akan jadi pusat isu FSLDK, mekanismenya itu jadi kerepotan juga. Ada informasi, diolah oleh MCP, nanti diturunkan ke Puskomnas. Kita ngapain pusing-pusing mroses kalo kemudian Puskomnas lagi yang memutuskan. Karena persoalan-persoalan yang dibahas di FS kan gak mungkin persoalan yang jangka panjang. Itu biasanya aktual dan itu butuh penyikapan yang cepat. Kalo prosesnya seperti itu ya tidak pas .."* kemudian dikatakan lagi, *"...ya anehnya kan gini ya, ketika JS jadi MCP, isunya kan bisa datang dari manapun, terus kita olah. Kita keluarkan, selesai. Karena ini pusatnya. Tapi kita olah dan kirim ke puskomnas. Saya belum paham mekanisme ini.."*

Dari apa yang disampaikan Huda di atas, tampak ada sebuah keluhan bahwa dia

sendiri belum sepakat dengan mekanisme yang ada, antara MCP dan Puskomnas. Bahkan Huda masih belum tahu MCP itu posisinya semacam apa, seperti yang disampaikan berikut, “*Kalau dulu yang saya pahami, MCP, FSLDK, dia ini kayak...posisinya apa semacam litbang atau apa. Saya juga bingung. Karena itu tadi, mekanisme ke Puskomnas. Tidak jelas juga kesepakatan-kesepakatannya seperti apa..*” Kemudian Huda mengambil langkah untuk menunda mengurus MCP ini, seperti pada pernyataan berikut, “*..Ya saya sendiri masih menunda untuk mengolah FS dan MCP, itu masih saya tunda. Karena kebutuhan kita ini belum jelas terhadap MCP..*”

Sedikit keterangan, dari sudut pandang JS sebagai pengemban amanah MCP, yang dipersoalkan bukan pada kebijakan yang kemudian diambil terhadap amanah tersebut di mana seolah-olah JS belum akan menseseriusi MCP itu karena ketidakjelasan. Yang dipersoalkan disini adalah mengapa keluhan semacam itu tidak saling dikomunikasikan antara JS sebagai pengemban MCP dan Puskomnas sebagai pemberi amanah. Memang benar bahwa tidak ada hubungan struktural yang mengikat antara JS UGM dengan JN UKMI UNS didalam jaringan FSLDK ini, seperti juga dengan LDK-LDK yang lain, namun dalam konteks adanya sesuatu hal, suatu ide yang pernah setidaknya dibicarakan bersama, mengapa ketika ide tersebut belum sempurna, masing-masing pihak mengambil asumsi-asumsi dan kebijakan sendiri. Tidak ada komunikasi yang baik, duduk bersama membicarakan ini, bukan dalam posisi mempengaruhi-dipengaruhi, mengatur-diatur, subjek-objek, sama sekali bukan. Namun di sini, adanya penghargaan terhadap ide, jika memang MCP itu adalah sebuah ide yang bagus, yang akan banyak sekali membantu kegiatan dakwah di nusantara, membantu banyak sekali teman-teman LDK yang membutuhkan informasi yang bisa dipercaya, mengukuhkan eksistensi FSLDK di hadapan publik dengan segala macam sikap bersama yang diambil dengan analisis yang cerdas, sebuah nilai-nilai kebersamaan gerak dan intelektual diantara LDK-LDK, mengukuhkan jaringan dengan banyak lembaga yang akan saling *support* satu sama lain, dan masih banyak lagi kemanfaatan-kemanfaatan dari satu ide itu jika mau digali lebih dalam. Maka mengapa tidak berusaha mempercepat proses itu hingga fungsi-fungsi tadi dapat segera dirasakan manfaatnya. Jika memang saat ini bayi prematur bernama MCP itu benar-benar belum maksimal, maka matangkan ia dan jaga dalam inkubator, rawat dengan baik, berikan nutrisi-nutrisi yang banyak agar dia sehat dan ketika waktunya nanti akan mendatangkan banyak manfaat, bukannya dibunuh atau dibiarkan terlantar, karena bagaimanapun sesuatu itu sudah lahir ke dunia.

E. Sekedar Kata Penutup

Apa yang telah diungkapkan dalam rubrik ini, laporan investigasi Al-Manär terhadap FSLDK berikut data-data yang dilampirkan sebagai bahan untuk dianalisis bersama-sama, hasil-hasil wawancara dalam *exclusive interview* yang dipublikasikan disini dan tulisan-tulisan pendukung lainnya baik dari Puskomnas maupun aktor FSLDK, semua itu tidak akan penulis buat kesimpulan. Apapun yang dikemukakan secara utuh dan terbuka disini bukan sekedar untuk sampai pada generalisasi maupun kesimpulan-kesimpulan sederhana. Akan lebih baik, jika semua tulisan dalam menu-menu yang ada ini dapat dijadikan referensi, tak hanya untuk bahan refleksi saja tapi juga menjadi salah satu stimulus bagi kita semua untuk memulai suatu pandangan

baru, yang didalamnya ada keterbukaan, berbagi dengan santun dan cerdas, 'membaca' sekeliling (dan dirinya sendiri) dengan jujur dan dewasa.

Banyak hal, dari semua bukti, data dan pengakuan yang masih tercecer dalam tulisan panjang diatas setidaknya melahirkan beberapa pertanyaan penting (dan bukan kesimpulan apalagi justifikasi), apa yang salah dengan FSLDK, apa yang keliru dengan paradigma yang selama ini dikonstruksi, FSLDK -dengan posisi yang makin tidak jelas tersebut- memiliki banyak PR yang mau tidak mau harus diselesaikan dengan segera, mengeluarkan dirinya dari lingkaran setan persoalan, untuk dapat lebih peka dan cerdas "membaca" persoalan umat disekelilingnya yang tidak bisa menunggu terlalu lama untuk diselesaikan. Mengutip kata Chairil "*..karena kerja belum selesai, belum apa-apa..*" (Meif).

Daftar Pustaka

1. Budi Handoyo Nugroho. Konsep Dakwah Kampus. 2001
2. Budi Handoyo Nugroho. Konsep dan Peran Strategis Dakwah Kampus. 2001
3. Budi Handoyo Nugroho. Sejarah FS-LDK Nasional. 2001
4. Ismail Yusanto, LDK : Antara Visi, Misi dan Realitas Sejarah Perkembangannya. 1997
5. Konsep Media Center Isu-isu Nasional FSLDK 1423-1424
6. Piagam Lembaga Dakwah Kampus. Unisba 1995
7. Sosialisasi Puskomnas JN-UKMI UNS. 2003
8. Temu Puskomda Se-Indonesia. UNS September 2003